

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN

SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : 92/DJPSDKP/TU.140/V/2023

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Direktur Jenderal PSDKP
Hal : Laporan Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 16 Mei 2023

Sebagai salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Ditjen PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Menteri lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

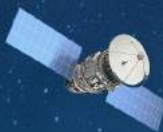


Ditandatangani
Secara elektronik

Adin Nurawaluddin

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Jenderal KKP;
2. Plt. Inspektur Jenderal KKP;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup KKP.



LAPORAN KINERJA DITJEN PSDKP TRIWULAN I TAHUN 2023



KAPAL PENGAWAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

#PSDKP
SAHABAT
NELAYAN

#2023
KMP THRIVE



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2022 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang tahun 2022 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian seluruh indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan nilai sebesar 116,37%, dengan kategori **“Istimewa”**. Capaian kinerja tersebut selaras dengan realisasi anggaran sebesar 12,04%. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 5 (lima) kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP** yaitu **“Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi”** dan **core value “ASN BerAKHLAK”** mewujudkan PSDKP menjadi **Benteng KKP** yang **Hebat** dalam mengawal **Kebijakan Ekonomi Biru**.

Jakarta, 16 Mei 2023
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2023.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Ditjen PSDKP triwulan I Tahun 2023 mencapai **116,37%**, dengan kategori “Istimewa”. Pada triwulan I tahun 2023, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya, dan seluruhnya tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan I	Realisasi	%
1	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100
2	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	89,4	89,4	98,30	109,96
3	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80	57,50	77,58	120
4	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	45	59,80	120
5	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	30	92,24	120
6	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	30	86,42	120
7	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	75%	75%	100%	120
8	Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	92%	92%	98,37%	107

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDKP sampai dengan triwulan I tahun 2023 antara lain: pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, operasional pusat pengendalian, pembangunan prasarana pengawasan SDKP, perawatan sarana pengawasan SDKP serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Selain kegiatan teknis

tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PSDKP juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan manajerial antara lain: penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, serta Implementasi program budaya kerja “PILAR” yaitu UPDATE (upayakan data terkini).

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2023 sebesar Rp. 1.151.263.730.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. **138.624.148.729**; atau 12,04%.

DAFTAR ISI

i	Kata Pengantar	
ii	Ikhtisar Eksekutif	
III-1	Bab III Akuntabilitas Kinerja	
I-1	Bab I Pendahuluan	IV-1 Bab IV Penutup
II-1	Bab II Perencanaan Kinerja	Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru, yaitu:

1

Penambahan luas wilayah konservasi perairan .

Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂

2

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan

3

Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.

Mengurangi tekanan sumber daya ikan dilaut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan

4

Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengurangi tekanan/dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil

5

Pembersihan sampah plastik di Laut

Melalui gerakan partisipasi nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat

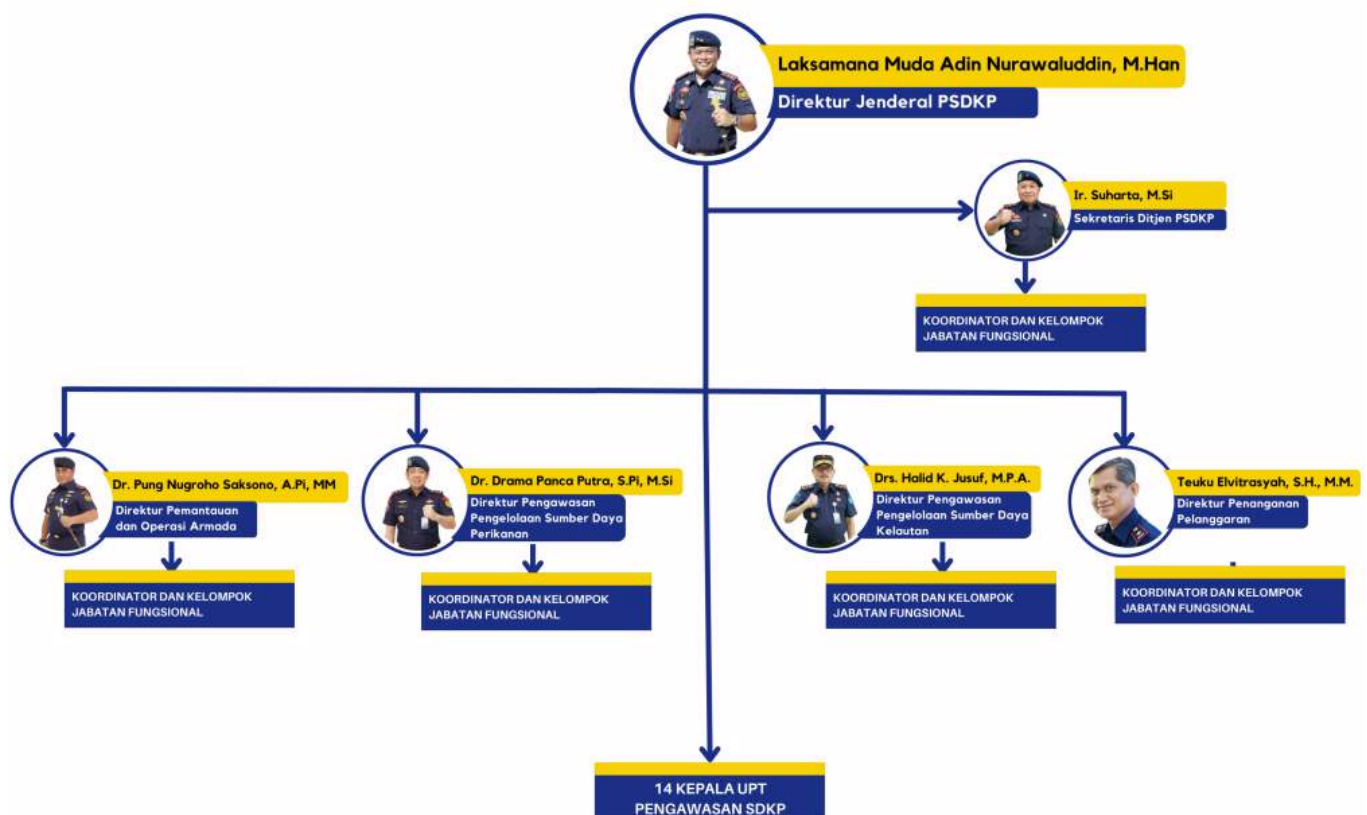
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Pemanfaatan Ruang laut membutuhkan pengawasan secara tegas dalam mengawal kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut baik diwilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi belum memiliki perizinan.
2. Distribusi importasi hasil perikanan tidak sesuai peruntukannya yang mengancam hasil tangkapan nelayan lokal.
3. Pengenaan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan pasca Undang-undang Cipta Kerja. Adapun penindakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
4. Praktik *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).

C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP	BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2023
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023	BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan

fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
Sasaran program Indikator Kinerja		Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat							
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90	
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat							
	Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98	
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif							
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75	
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89	
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas							
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	Persentase	93	93	93	93	93	
Program 2 Dukungan Manajemen								
Sasaran program Indikator Kinerja		Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP							
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34	
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8	
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1	
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76	
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75	
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1	
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3	
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80	
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90	
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89	

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terdapat indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana dibahas dibawah ini.

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 22 (dua puluh dua) IKU. Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	-
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	-
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tidak ada	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP menjadi IKU level 0

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga nomenklatur dan formulasi penghitungannya disesuaikan menggunakan teknologi citra satelit
Tidak ada	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 disajikan Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023

Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	nilai	73
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	87
Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif			
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP	Indeks	89,4
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP	Indeks	80
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif			
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	86
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
9	Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	33,5
10	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang	Indeks	70

	pengawasan SDKP		
11	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	12
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	78
14	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	80,50
15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022	%	≤0,5
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	%	75
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	75
18	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	%	92
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP	Persentase	77,5
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	77,5
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	89
22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP sebesar **116,37%**, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajerial. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan I	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73	-	-	-
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87%	-	-	-
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100%	100%	100%	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	89,4	89,4	98,30	109,96
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	80	57,50	77,58	120
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	45	59,80	120
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	30	92,24	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	30	86,42	120
9	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	33,5	-	-	-
10	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
11	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	12	-	-	-
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP (level)	3	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78	-	-	-
14	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	80,5	-	-	-
15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat	≤0,5%	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan I	Realisasi	%
	Jenderal PSDKP tahun 2022 (%)				
16	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	75%	75%	100%	120
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75	-	-	-
18	Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	92%	92%	98,37%	107%
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	77,5%	-	-	-
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	77,5%	-	-	-
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89	-	-	-
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1

KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT

1. IKU 1 Nilai Pemahaman Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDKP Yang Tertib dan Bertanggungjawab

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	73	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pencapaiannya pada triwulan I, sehingga belum ada realisasinya, namun beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian telah dilaksanakan antara lain:

- Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pemberian pemahaman nelayan pelintas batas pada tanggal 19 Februari 2023. Koordinasi melibatkan Eselon I KKP, Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Pemprov Provinsi Papua Selatan, Pemkab Merauke, KBRI Papua Nugini. Rencana dilaksanakan bulan Juni di Merauke.
- Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Perairan. Kegiatan dilaksanakan di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 9 Februari 2023. Adapun rangkaian kegiatan adalah Sosialisasi kepada 200 orang yang terdiri dari nelayan, pengguna jasa Pelabuhan Tegalsari, instansi pemerintah dan NGO terkait, Deklarasi Stop Mencemari Laut bersama peserta kegiatan, penyampaian materi oleh perwakilan

dari Ditjen PRL, Ditjen PSDKP, LANAL Tegal, DKP Jawa Tengah dan DLH Kota Tegal, Penempelan stiker Stop Cemari laut pada kapal perikanan yang bersandar di Pelabuhan Tegalsari.

- c. Kampanye dan Edukasi Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi. Pada tanggal 15 Februari 2023, pada rangkaian acara kampanye dan edukasi pengawasan pemanfaatan penyu di Morowali, dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan deklarasi stop pemanfaatan penyu sebagai bentuk komitmen Pemda dan masyarakat Morowali untuk bersama-sama memerangi pemanfaatan penyu secara illegal. Dilaksanakan juga penyerahan piagam penghargaan Dirjen PSDKP kepada 6 instansi yang berperan aktif dalam pelestarian penyu di Kab. Morowali yaitu: MUI, Dinas Perikanan, Polres, Bankespol Morowali, Sombori Diving Club dan Masyarakat Pelestari Penyu Pulau Dua Darat.

2. IKU 2 Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	87	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pencapaiannya pada triwulan I, sehingga belum ada realisasinya, namun beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian telah dilaksanakan antara lain:

- a. Sosialisasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat Bersama Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI. Dalam kegiatan ini disepakati lokasi serta waktu pelaksanaan penyadartahuan masyarakat khususnya pembinaan POKMASWAS tahun 2023.
- b. Menyusun rencana pembinaan Pokmaswas yang akan dilaksanakan periode triwulan II Tahun 2023.



Gambar 1 Sosialisasi dan sinkronisasi penyadartahuan Masyarakat Bersama Tenaga Ahli DPRRI Tahun 2023

SASARAN PROGRAM 2

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN EFEKTIF

1. IKU 3. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	112,90%	100%	100%	100%	100	100	-	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 WPPNRI. Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diperoleh dari hasil pemantauan terhadap aktivitas kapal-kapal diseluruh WPPNRI. Pemantauan menggunakan citra satelit antara lain *Automatic Identification System (AIS)*, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan pemantauan melalui pesawat patroli.

Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan *Vessel Monitoring System (VMS)*, dimana kapal perikanan telah mengajukan dan mengaktifkan transmitter yang terpasang dikapal. Sistem ini hanya ada pada Kapal perikanan yang berbendera Indonesia serta telah mengajukan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Berdasarkan hasil pemantauan melalui SPKP pada periode triwulan I Tahun 2023, Bulan Maret terpantau sebanyak 4.565 kapal yang beroperasi di seluruh WPPNRI, meningkat dari awal hasil pemantauan bulan Januari sebanyak 350 kapal dari 4.215 kapal. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal perikanan sepanjang periode triwulan I Tahun 2023, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.1.

Pemantauan Kapal melalui SPKP Triwulan I Tahun 2023

WPPNRI	Januari	Februari	Maret
571	16	27	36
572	284	270	281
573	308	360	417

WPPNRI	Januari	Februari	Maret
711	516	591	710
712	1.779	1.826	1.911
713	221	204	129
714	68	104	202
715	238	238	258
716	56	60	80
717	45	52	52
718	1.024	950	759
Total	4.215	4.373	4.565

Pemantauan kapal menggunakan AIS telah dilakukan diseluruh WPPNRI, tercatat sebanyak 19.050 kapal terpantau di Bulan Maret 2023. Kapal yang terpantau adalah semua jenis kapal yang melakukan operasi atau berlayar, tidak hanya Kapal perikanan saja, termasuk juga kapal asing yang melintas di WPPNRI. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal menggunakan AIS disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pemantauan kapal melalui AIS

WPPNRI	Januari	Februari	Maret
571	687	574	743
572	1197	1252	761
573	568	587	646
711	3737	3390	3621
712	3260	3352	3675
713	2416	2168	2785
714	686	709	813
715	3090	1169	1986
716	215	282	252
717	99	83	89
718	2001	1998	2135
Total	19.461	16.023	19.050

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Pemantauan dikawasan konservasi dilakukan untuk memantau kapal-kapal yang

melakukan aktivitas dikawasan tersebut. Pada triwulan I 2023, dilaksanakan pemantauan di 6 (enam) kawasan konservasi perairan, 3 (tiga) KKP3K, 2 (dua) Suaka Alam Perairan (SAP), 1 (satu) Taman Nasional Perairan (TNP) dan 2 (dua) Taman Wisata Perairan (TWP). Berdasarkan hasil pemantauan sebanyak 122 kapal beroperasi dibulan Maret 2023. Rekapitulasi hasil pemantauan periode triwulan I tahun 2023 disajikan Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Pemantauan Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2023

WPPNRI	Zona Konservasi	Januari	Februari	Maret
715	Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Teluk Etna, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	8	3	4
713	Kawasan Konservasi Perairan Gili Sulat, Gili Lawang, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	1	1
715	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat	9	6	10
572	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa Dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara	1	0	1
572	Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai Di Provinsi Sumatera Barat	5	5	1
716	KKP3K Kepulauan Derawan Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur	4	7	0
714	KKP3K Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku	4	0	0
712	KKP3K Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang Di Provinsi Jawa Tengah	25	10	0
718	Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Maluku	169	115	21
717	Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat	1	0	1
573	Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Dan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	29	17	16
711	Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau	17	24	62
717	Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua	9	6	3
573	Kawasan Konservasi Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak, Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	1	0
573	Kawasan Konservasi Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya	-	-	2
TOTAL		282	195	122

Pada periode triwulan I tahun 2023, juga telah dilaksanakan pemantauan melalui pesawat patroli di wilayah WPPNRI 572 tepatnya diperairan Nias, terkait dengan tumpahan minyak dari kapal pengangkut aspal.

Hasil pemantauan diatas, selanjutnya digunakan untuk keperluan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Bahan penentuan/pembuatan rencana Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan

Perikanan;

- b. Bahan penentuan/pembuatan rencana Operasi *Aiborne Surveillance*;
- c. Bahan untuk pengawasan pencemaran perairan;

Realisasi tahun triwulan I 2023 jika dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2022, menurun sebesar 12,95%. Penurunan tersebut disebabkan perbedaan formulasi perhitungan, dimana pada tahun 2022 menggunakan data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah SKAT yang diterbitkan sedangkan ditahun 2023 yang dihitung capaian adalah jumlah WPPNRI yang terpantau. Pada Renstra 2020-2024 indikator kinerja nya adalah Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal fishing* dengan target 75%, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target renstra.

2. IKU 4 Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89,4	89,4	98,30	109,96	109,96	-	-

Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu a) Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Indeks Kinerja	Nilai
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	98.73
Speedboat Pengawas	97.65
Pesawat Patroli	98.53
	98.30

Kinerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Ditjen PSDKP memiliki 30 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan dilaut serta mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menangkap kapal perikanan apabila terindikasi melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beroperasi diseluruh WPPNRI dengan target hari operasi tahun 2023 sebanyak 90 hari Operasi. Penempatan Kapal Pengawas KP tersebar di 14 Pangkalan Pengawasan SDKP diseluruh Indonesia. Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada gambar 2.



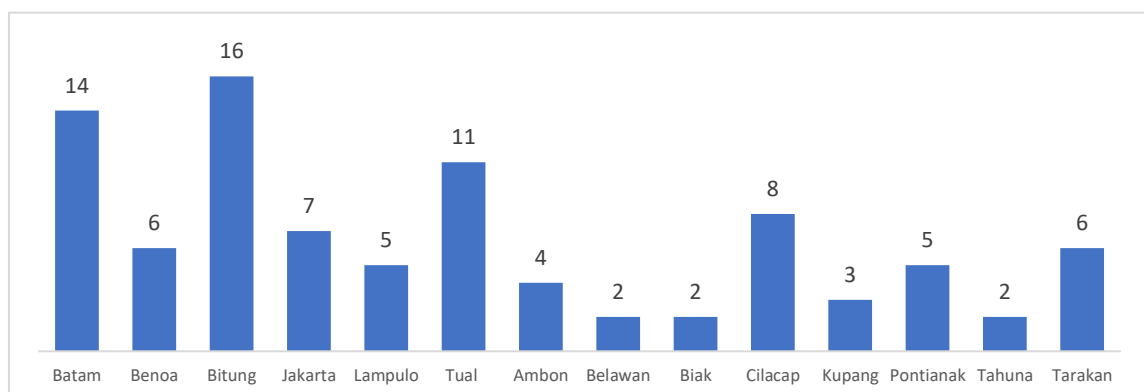
Gambar 2 Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Pada periode triwulan I tahun 2023, rata-rata hari operasi 17 hari operasi dan berhasil memeriksa 1.269 Kapal terdiri dari 1259 KII dan 10 KIA serta mengawasi 9,22 nm² WPPNRI. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditangkap dan diproses sebanyak 41 kapal terdiri dari 33 KII dan 8 KIA. Seluruh kapal yang ditangkap selanjutnya diproses hukum oleh PPNS Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP.



Kinerja Speedboat Pengawas

Tahun 2023, Ditjen PSDKP mengoperasikan 91 *speedboat* pengawas untuk beroperasi di wilayah laut kurang dari 12 mil serta di kawasan konservasi. Operasional speedboat dilakukan oleh UPT Pengawasan SDKP serta satuan pengawasan dibawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Speedboat yang dimiliki berbagai ukuran antara lain : Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Rubber Boat. Sebaran speedboat pengawas di UPT PSDKP sebagai berikut:



Gambar 3. Sebaran Speedboat Pengawas SDKP

Periode Triwulan I Tahun 2023, speedboat pengawas telah beroperasi sebanyak 4 hari operasi dari target 30 hari operasi tahun 2023. Telah memeriksa 885 kapal (ditangkap 1 Kapal), 4 pelaku usaha kelautan serta telah mengawasi sekitar 0,11nm2 WPPNRI.

Kinerja Pesawat Patroli

Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli Hawker, King Air dan ATR. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan selama 39 hari yang meliputi di 7 WPPNRI yakni 571, 572, 711, 712, 713, 714, dan 716 dengan hasil pemantauan sebanyak 291 kapal perikanan (260 kapal Indonesia dan 31 kapal ikan asing) serta 35 Alat Bantu Penangkap Ikan berupa rumpon. Hasil pemantauan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapal Pengawas dengan menangkap kapal ikan asing asal Vietnam dan Filipina. Selain itu juga Operasi Pesawat telah memantau 5 Kawasan Konservasi (KKPD Nias Utara, KKPN Anambas, KKPN Gili Trawangan, KKPD Mentawai, dan KKPN Kapoposang).



Gambar 4 KIA Vietnam yang terpantau melalui Pesawat Patroli dan berhasil ditangkap KP Orca 03

3. IKU 5 Indeks Kinerja Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	57,50	77,58	120	96,97	-	-

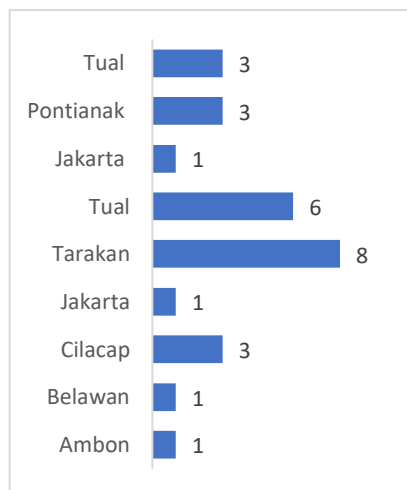
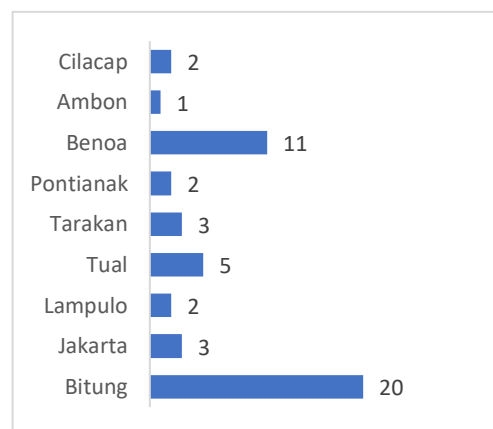
a. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan

1) Pelaku usaha kelautan

Pada triwulan I Tahun 2023 pelaku usaha kelautan diperiksa/diawasi sebanyak 381 pelaku usaha. Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan yang berada di UPT Pengawasan SDKP dan satuan pengawasan yang tersebar diseluruh Indonesia. Terdapat 9 (sembilan) objek yang dilakukan pengawasan, sebagai berikut :

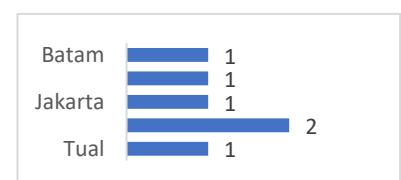
No	Pengawasan	Diperiksa
1	Pemanfaatan pengelolaan Ruang Laut	49
2	Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	27
3	Pengusaha Garam	2
4	Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)	6
5	Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA	12
6	Wisata tirta lainnya	10
7	Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan	23
8	Penangkapan Ikan Yang Merusak (Destructive Fishing)	205
9	Pencemaran perairan	47
	Jumlah	381

- a) Pengawasan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja 9 (sembilan) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 49 pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak diperiksa pada periode triwulan I adalah di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 20 pelaku usaha. Lokasi pemeriksaan pelaku usaha tersebut berada di Morowali, Konawe Utara, Kolaka, dan Bitung.

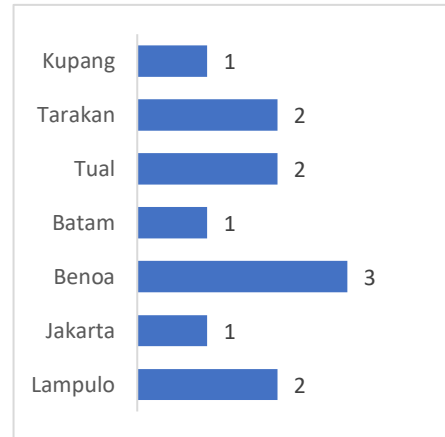


- b) Pengawasan terhadap pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES di wilayah kerja 9 (sembilan) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 27 pelaku usaha. Pelaku usaha paling banyak diperiksa pada periode triwulan I adalah di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 8 pelaku usaha. Lokasi pemeriksaan pelaku usaha tersebut berada di Nunukan, Banjarmasin, dan Berau.

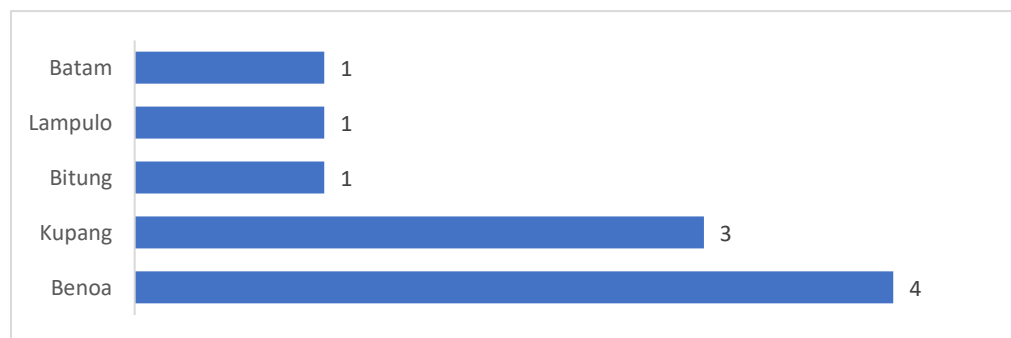
- c) Pengawasan terhadap perusahaan garam dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa, dan Stasiun PSDKP Kupang.
- d) Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi) di wilayah kerja 5 (lima) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 6 pelaku usaha.



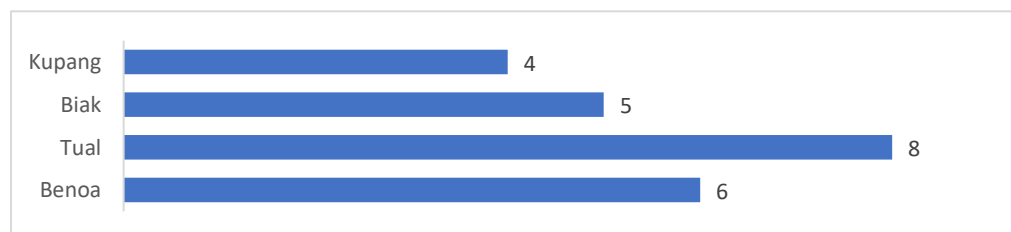
e) Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA di wilayah kerja 7 (tujuh) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 12 pelaku usaha. Pelaku usaha di wilayah Benoa paling banyak diperiksa pada triwulan I tahun 2023.



f) Pengawasan terhadap pelaku usaha wisata tirta lainnya di wilayah kerja 5 (lima) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 10 pelaku usaha. Pada triwulan I tahun 2023, pelaku usaha paling banyak diperiksa sebanyak 4 pelaku usaha di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa.



g) Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan di 4 (empat) Pangkalan PSDKP dan berhasil memeriksa 23 pelaku usaha di 4 kawasan konservasi perairan nasional yaitu TNP Laut Sawu, TWP Padaido, SAP Raja Ampat dan TWP Gili Matra. Berdasarkan pemeriksaan di triwulan I Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Tual paling banyak memeriksa sebanyak 8 pelaku usaha.



- h) Pengawasan Pencemaran perairan di wilayah kerja 6 (enam) Pangkalan PSDKP.
dan berhasil memeriksa 47 pelaku usaha.

Pada periode Triwulan I tahun 2023, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan melalui peneraan sanksi administratif, telah dilaksanakan tindakan paksaan pemerintah berupa penyegelan karena tidak memiliki dokumen izin reklamasi dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, antara lain:

1. Peneraan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus PT TIRAN INDONESIA, di Konawe utara Sulawesi Tenggara, pada tanggal 15 Februari 2023;
2. Pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah/Penghentian Sementara Kegiatan PT Pulau Bawah di Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 10 Maret 2023,
3. Pelaksanaan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan PT Baoshuo Taman Industry Investment (BTII) di Kab. Morowali Sulteng, pada tanggal 16 Maret 2023,
4. Penerapan Sanksi Administrasi berupa Paksaan Pemerintah (penyegelan) hasil Pengawasan Sumberdaya Kelautan terkait Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah pesisir Batam Kepulauan Riau Milik PT BSSTEC dan PT MPP.



2) Pelaku Usaha Perikanan

Pada triwulan I 2023, jumlah pelaku usaha yang patuh sejumlah 54 pelaku usaha dari jumlah yang diperiksa sejumlah 124 pelaku usaha. Target tahun 2023, pelaku usaha 2.442 yang akan diperiksa. Hasil pemeriksaan 124 terdiri dari 4 subsektor sebagai berikut:

No	Subsektor	Diperiksa
1	Pengawasan penangkapan ikan	18
2	Pengawasan pengolahan hasil perikanan	35
3	Pengawasan pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan	42
4	Pengawasan pembudidayaan ikan	29
	Jumlah	124

Pemeriksaan pelaku usaha dilakukan oleh pengawas perikanan di UPT Pengawasan SDKP secara rutin dan tidak rutin (mendukung Penangkapan Ikan terukur), sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa
1	Batam	10
2	Benoa	23
3	Bitung	4
4	Jakarta	20
5	Tual	22
6	Cilacap	31
7	Pontianak	5
8	Tarakan	3
9	Ambon	1
10	Belawan	1
11	Tahuna	4
	Jumlah	124

Terdapat 3 (tiga) UPT PSDKP yang masih belum melakukan kegiatan pemeriksaan dikarenakan terkendala beberapa hal sebagai berikut:

- Penerbitan Surat Tugas Kunjungan Lapangan (STKL) dari aplikasi OSS yaitu Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Biak);
- Pemekaran provinsi baru di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sehingga daftar pelaku usaha masih belum ditetapkan secara administratif dalam sistem OSS;
- Adanya kendala pada sistem OSS.
- Kebijakan penangkapan ikan terukur yang belum implementatif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi pada periode Triwulan I Tahun 2023 dilakukan beberapa upaya di periode Triwulan II Tahun 2023:

- Usulan rencana pengawasan yang telah disusun pada tahun 2022 sebagian besar dilakukan di Triwulan II Tahun 2023;
- Berkoordinasi dengan BKPM kendala di sistem OSS, sehingga rencana pengawasan dapat dilakukan sesuai jadwal;
- Berkoordinasi dengan UPT PSDKP sebagai pelaksana pengawasan, agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- Berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap sebagai penanggungjawab kebijakan penangkapan ikan terukur;

Pada periode Triwulan I tahun 2023, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan melalui pengenaan sanksi administratif, telah dilaksanakan tindakan paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan berusaha terhadap PT. Singa Segara

Indonesia (PT. SSI) sebagai tindak lanjut ditemukannya ikan salem impor yang masuk ke pasar Tradisional Juwana, Kab. Pati Jawa Tengah, yang seharusnya hanya untuk bahan baku industri pemindangan. Jumlah Ikan Salem impor yang disegel ±100 ton di Gudang PT. SSI.



Gambar 5 Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaludin M.Han. melakukan penyegelan PT. SSI di Pati Jawa Tengah

b. Verifikasi Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan

Verifikasi dilakukan terhadap hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh pengawas perikanan. Tujuannya dilakukan Verifikasi untuk memastikan kualitas hasil pengawasan sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang selanjutnya menetapkan kepatuhan pelaku usaha. Uraian hasil verifikasi sebagai berikut:

1) Kelautan

Pada tahun 2023, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan terdiri dari penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K, efektivitas pelaksanaan sengketa WP3K di luar pengadilan, dan efektivitas pelaksanaan audit tata ruang laut. Adapun verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K adalah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi, pemanfaatan kawasan konservasi nasional, wisata tirta lainnya, ekstraksi garam, reklamasi, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF, Pada triwulan I, sebanyak 381 pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan 158 pelaku usaha diantaranya atau 50,91% sudah dilakukan verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pengawasan	Diperiksa	Diverifikasi
1	Pemanfaatan Ruang Laut	49	38
2	Pemanfaatan Ikan Dilindungi / CITES	27	27
3	Kawasan Konservasi Nasional	23	0
4	Reklamasi	6	4
5	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	12	1
6	Wisata Tirta Lainnya	10	5
7	Ekstraksi Garam	2	1
8	<i>Destructive Fishing</i>	205	42
9	Pencemaran Perairan	47	40
Jumlah		381	158

2) Perikanan

Tahapan verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan data dukung hasil pengawasan yang disampaikan oleh Pengawas Perikanan di UPT Pengawasan SDKP kepada Ditjen PSDKP. Data dukung dinyatakan lengkap apabila melampirkan Surat Pemberitahuan, Surat Tugas, Daftar Pertanyaan, Berita Acara Pemeriksaan, Form Penilaian Kepatuhan Teknis dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi kesesuaian pengisian form Berita Acara Pemeriksaan, Form Penilaian Kepatuhan Teknis sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas perikanan terdapat indikasi ketidaksesuaian maka akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan jenis tindak lanjut yang akan dilakukan.

Tindak lanjut berupa pembinaan dan perbaikan akan diberikan kepada pelaku usaha yang belum memenuhi standar mutu dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko namun bukan termasuk pelanggaran administratif maupun pidana. Tindak lanjut berupa rekomendasi sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.

Laporan hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan yang dilaporkan periode Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 124 laporan. Sebanyak 64 laporan telah terverifikasi sedangkan 60 laporan masih proses pendalaman.

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa	Jumlah Pelaku yang Diverifikasi
1	Batam	10	1
2	Benoa	23	19
3	Bitung	4	4
4	Jakarta	20	13
5	Tual	22	10

6	Cilacap	31	12
7	Pontianak	5	4
8	Tarakan	3	0
9	Ambon	1	1
10	Belawan	1	0
11	Tahuna	4	0
	Jumlah	124	64

Hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan berupa 3 jenis rekomendasi akhir yaitu: Telah Memenuhi Syarat (TMS), Pembinaan dan Perbaikan, serta Pengenaan Sanksi. Hasil verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan periode Triwulan I diketahui:

- Telah memenuhi syarat sebanyak 54 pelaku usaha; dan
- Sanksi administratif sebanyak 10 pelaku usaha yaitu, 2 pelaku usaha diberikan rekomendasi sanksi teguran tertulis I dan 8 pelaku usaha diberikan rekomendasi pencabutan non likuidasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode Triwulan I Tahun 2023, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

- Meningkatkan jumlah laporan hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terverifikasi;
- Menetapkan SOP verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Menetapkan tim verifikasi dengan mempertimbangkan target pelaku usaha yang diverifikasi.

4. IKU 6 Indeks Kesiapan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	45	59,80	120	74,75	-	-

Capaian Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP diperoleh dari kesiapan sarana sebesar 97,96 dan kesiapan prasarana sebesar 21,64. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian periode triwulan tahun-tahun sebelumnya serta belum dicantumkan dalam renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam hala ini sarana pengawasan SDKP meliputi Kapal Pengawas kelautan dan Perikanan serta speedboat pengawas. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*),
- Perawatan prediktif (*predictive maintenance*),

c. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP dibatasi hanya bagi bangunan pengawasan utama di UPT PSDKP yaitu kantor, mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara dan Gedung serbaguna. Pada triwulan I tahun 2023, sebanyak 5 prasarana yang sudah mulai dibangun di 3 (tiga) UPT Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Triwulan I		
		Lampulo	Batam	Jakarta
1	Pos Pengawasan/Kantor	100	96,88	100
2	Bangunan Operator/Mess	100	100	
3	Dermaga		100	
4	Gudang		100	
5	Tempat Penampungan Sementara	100	78	

SASARAN PROGRAM 3

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 7 Indeks Kinerja Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022			Tahun 2023					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	30	92,24	120	115,3	-	-

Indeks kinerja penanganan pelanggaran Administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil penerapan sanksi administratif dan kesesuaian penerapan sanksi administratif sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	88.91	70%	62.23
Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif Dengan Peraturan Perundang –Undangan	100	30%	30
			92.24

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemeriksaan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Penerapan sanksi administratif sektor perikanan menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain penerapan sanksi administratif untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- a) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- c) UPT PSDKP/Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan);
- d) Dit. PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Capaian indikator kinerja persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2023 sebesar 88,91% yang diperoleh dari jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebanyak 203 pelanggaran dan total kasus sebanyak 252 pelanggaran.

Tabel 3.5. Penyelesaian Penanganan Sanksi Administratif 2023

No.	Lokasi Penanganan Perkara	Total Kasus		Kasus Selesai	
		SPKP	Sanksi Adm	SPKP	Sanksi Adm
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	62	2	37	2
2	Pangkalan PSDKP Batam	6	5	0	5
3	Pangkalan PSDKP Lampulo	9	1	9	1
4	Pangkalan PSDKP Benoa	4	0	0	0
5	Pangkalan PSDKP Bitung	10	9	5	9
6	Pangkalan PSDKP Tual	11	0	11	0
7	Stasiun PSDKP Cilacap	112	4	106	4
8	Stasiun PSDKP Tahuna	1	2	1	2
9	Stasiun PSDKP Ambon	0	2	0	2
10	Stasiun PSDKP Tarakan	1	6	1	6
11	Stasiun PSDKP Belawan	3	0	2	0
12	Stasiun PSDKP Pontianak	2	0	0	0
	Jumlah	221	31	172	31
		252		203	

Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif yaitu kesesuaian penerapan sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan adalah penerapan pasal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP yang pertama diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kesesuaian penerapan sanksi administratif dilakukan terhadap 31 Kasus sanksi administratif, dan seluruhnya sudah sesuai.

SASARAN PROGRAM 4

PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 8 Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP)

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022			Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	30	86,42	120	100,49	-	-

Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil penyelesaian penyidikan dan kualitas penyidikan sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	88.89	70%	62.22
Indeks kualitas penanganan Bidang KP	80.67	30%	24.201
			86.42

Penyelesaian penyidikan TPKP

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II). Capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2023 ini sebesar 88,89%, diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 9 kasus dengan jumlah kasus yang sudah selesai 8 kasus dengan 3 kasus proses tahap P-21 dan tahap II sebanyak 5 kasus.

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	TPP / TPK
1	Batam	1	-	1 kasus TPP
2	Bitung	5	5	1 kasus TPP 4 kasus TPK
3	Cilacap	2	2	2 kasus TPP
4	Belawan	1	1	1 kasus TPP
Jumlah		9	8	

Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I tahun 2023, penanganan kasus terbanyak terjadi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung, didalam penanganan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung lebih banyak tindak pidana kelautan yang menggunakan alat tangkap bahan peledak dalam melakukan kegiatan *destructive fishing*. Kasus tindak pidana perikanan terdapat kegiatan IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang diproses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan. Untuk proses penanganan penyidikan di Pangkalan PSDKP Batam masih terdapat 1 kasus yang belum selesai pada Triwulan I dikarenakan kasus tersebut masuk pada akhir Triwulan I dengan tanggal dimulainya SPDP terjadi di tanggal 27 Maret 2023 sehingga proses penanganannya akan dilaksanakan pada Triwulan II sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

Kualitas Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata-rata dari indeks perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan TPKP pada Triwulan I tahun 2023 diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan, persentase supervisi penanganan barang bukti, dan persentase supervisi penanganan awak kapal. Uraian penjelasan sebagai berikut:

a) Supervisi penyidikan

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 8 kasus dari total 9 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 4 kasus dan kelautan 4 kasus. Lokasi supervisi disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2023

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM	SUDAH SUPERVISI
Tindak Pidana Perikanan				
1	Khon Kheang	Stasiun PSDKP Belawan	Tahap II	V
2	Sugiyo Nurofik	Stasiun PSDKP Cilacap	Sidang Tingkat I	V
3	Riza Garnita	Stasiun PSDKP Cilacap	P-21	V
4	Glen Artur Sanotan	Pangkalan PSDKP Bitung	Sidang Tingkat I	V
5	Zaw Tun	Pangkalan PSDKP Batam	Penyidikan	-
Tindak Pidana Kelautan				
1	Parto Bin Juhaepa dan Ilma bin Jamaludin	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap II	V
2	Juhaepa bin Abe	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap II	V
3	Husban bin Alidua	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap II	V
4	Mirdan bin Hajirin	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap II	V

b) Supervisi Penanganan Barang Bukti

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II). Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan I tahun 2023 yaitu sebanyak 6 (enam) unit. Tahapan pembobotan supervisi penanganan barang bukti adalah:

Tabel 3.7.

Lokasi supervisi tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan I tahun 2023

No	Tahapan Penanganan	Nilai	Jumlah Barbuk	Rata-rata
1	Pengumpulan Data Barang Bukti	20%	-	-
2	Penentuan Lokasi Supervisi Prioritas	40%	1	40
3	Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi Dan Monitoring Penanganan Barang Bukti	95%	4	380
4	Pelaksanaan Penyerahan Barang Bukti	100%	1	100
	Total		6	70,83

c) Supervisi Penanganan Awak Kapal

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal Triwulan I tahun 2023 dilaksanakan di 3 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana TPKP, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional. Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku TPKP yang tidak dijadikan tersangka (non justitia) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan I tahun 2023 yaitu sebanyak 27 awak kapal yang masuk dalam proses hukum, tahapan pembobotan supervisi penanganan awak kapal adalah:

Tabel 3.8.
Tahapan Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Triwulan I
Tahun 2023

No	Tahapan Penanganan	Nilai	Jumlah Awak Kapal TPKP	Rata-rata
1	penyerahan tersangka/ bukan tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan	10%	-	-
2	pendataan dan penempatan tersangka/ bukan tersangka di tempat yang memadai	50%	14	700
3	merawat dan mengamankan awak kapal/tersangka/bukan tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke Rutan atau dipulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke kantor Imigrasi/rudenim	95%	-	-
4	tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka warga negara asing (WNA) ke kantor Imigrasi/Rudenim atau pemulangan awak kapal bukan tersangka warga negara Indonesia (WNI)	100%	13	1.300
Total			27	74,07

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2022, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas PPNS Sumber Daya Alam diselenggarakan oleh KPK yang bekerja sama dengan Yayasan Auriga Nusantara dengan jumlah peserta 65 orang PPNS lintas Kementerian/Lembaga dibidang Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup melalui koordinasi dan kolaborasi aparat penegak hukum di bidang SDA-LH melalui penyidikan bersama/multidoors;
- 2) Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang bidang Perikanan yang diselenggarakan oleh DISKUM TNI AL yang diikuti oleh 35 peserta dengan rincian peserta 30 orang berasal dari perwira TNI AL serta 5 orang dari KKP. Kegiatan ini bertujuan untuk upaya melengkapi kemampuan mengelola permasalahan – permasalahan di bidang perikanan yang mungkin timbul dalam melaksanakan tugas sesuai amanah dari Undang – Undang.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. IKM 9 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	33,5	-	-	-	-	34	-

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. IKM 10 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	70	-	-	-	-	-	-

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan monev kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur efektivitas kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP.

Pada tahun 2023 ditargetkan nilai indeks efektifitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan PSDKP sebesar 70. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan I tahun 2023, namun beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain: koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka persiapan kebijakan publik yang akan dilakukan penilaian. Hasil koordinasi dirumuskan hal penting dalam pelaksanaan penilaian yaitu setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%)

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
					d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)
2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

3. IKM 11 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	12	-	-	-	-	8	-

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2023 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 12 unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2023, ditargetkan 2 unit kerja yang berpredikat WBK yang pencapaiannya akan dilakukan penghitungan pada triwulan IV Tahun 2023. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja antara lain koordinasi secara terus menerus dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

4. IKM 12 Level Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	3	-	-	-	-	3	-

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2023 akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV Tahun 2023.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2023. Termasuk supervisi dan pendampingan kepada satker UPT yang diusulkan menjadi wilayah bebas

dari korupsi tahun 2023.

5. IKM 13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022			Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	78	-	-	-	-	76	-

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2023 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan II 2023, namun beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain pelayanan administrasi sumberdaya manusia aparatur, koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, diklat teknis lingkup Ditjen PSDKP.

6. IKM 14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022			Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80,5	-	-	-	-	87,75	-

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2023 belum dilakukan pengukuran, sehingga nilainya belum ada. Penilaian akan dilakukan terhadap komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja. Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- Perencanaan kinerja. Dialog kinerja pimpinan lingkup Ditjen PSDKP, Rapat Kerja Teknis Pengawasan SDKP; Penyusunan rencana kerja 2023, Penyusunan dna penandatanganan perjanjian kinerja level 2, penyusunan manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2022 dan pengisian capaian aplikasi kinerjaku, input data kinerja tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- Pelaporan Kinerja. Rekonsiliasi laporan kinerja tahun 2022 lingkup Ditjen. PSDKP, Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022.

7. IKM 15 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2022

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	>0,5	-	-	-	-	-	-

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2022 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan belum diterbitkan oleh BPK sehingga di periode triwulan I 2023, belum ada capaian.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu monitoring reguler atas pengelolaan anggaran minimal setiap triwulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSDKP baik pada unit kerja Ditjen PSDKP Pusat maupun Dekonsentrasi. Selain itu juga dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dokumen pertanggungjawaban keuangan ke lokasi yan di sampling.

8. IKM 16 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
37,93	89,80	46,81	75	75	100	120	120	80	120

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2022. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Hingga 31 Maret 2022 dari 26 rekomendasi telah ditindak lanjuti hingga tuntas seluruhnya.

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja diantaranya ¹⁾ melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ²⁾ selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait ³⁾ monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	6	6	100.00%	0	0.00%
2	BRSDMKP	113	106	93.81%	7	6.19%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	121	92	76.03%	29	23.97%
4	Ditjen PSDKP	26	26	100.00%	0	0.00%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	54	49	90.74%	5	9.26%
6	Ditjen PRL	131	109	83.21%	22	16.79%
7	Ditjen PDSPKP	26	23	88.46%	3	11.54%
8	BKIPM	103	97	94.17%	6	5.83%
9	Itjen	31	31	100.00%	0	0.00%
TOTAL		611	539	88.22%	72	11.78%

9. IKM 17 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	75	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Sehingga ditetapkan kriteria Inovasi adalah memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Sampai dengan triwulan I 2023 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2023.

10. IKM 18 Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
91,10	99,06	97,34	92	92	98,37	107	107	92	107

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 98,37 yang diperoleh dari 2 komponen yaitu pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni

dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



11. IKM 19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	77,5	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Sampai dengan triwulan I 2023 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2023.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2023, penginputan data kedalam aplikasi SIRUP, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan.

12. IKM 20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	77,5	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2023 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN, ²⁾ ketersediaan usulan

penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penghitungan kinerja ditetapkan tahunan, sehingga periode triwulan I tidak ada capaian. Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu Rekonsiliasi penyusunan laporan BMN semester II Tahun 2022. Selain itu, dilakukan pengelolaan BMN secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. IKM 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	89	-	-	-	-	80	-

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2023 belum dilakukan pengukuran, sehingga belum ada nilai yang disajikan.

14. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2022				Tahun 2023				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% thd TW I 2023	% thd tahun 2023	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	-	-	-	-	89	-

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan I Tahun 2023 belum dilakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak ada nilai yang disajikan.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian agar diperoleh nilai optimal nilai kinerja anggaran tahun 2023, antara lain:

- Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata

- realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
- b. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
 - c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;
 - d. Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;
 - e. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
 - f. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

C. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan triwulanan, namun dihitung tahunan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2023 sebesar **Rp. 1.151.263.730.000,-**. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp. **138.624.148.729**; atau **12,04%**. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2023, melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Kegiatan

Sasaran Program (SP)	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
SP.1 SP.2	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	762,127,889,000	762,127,889,000	10,58
SP.2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	24,555,290,000	2,507,486,395	10,21
SP.2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	24,871,820,000	24,871,820,000	5,27
SP.3 SP.4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	11,445,000,000	778,132,767	6,80
SP.5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	328,263,731,000	49,949,549,177	15,22
	JUMLAH	1.151.263.730.000	138.624.148.729	12,04

Rincian Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Ditjen. PSDKP tahun 2023, sebagai berikut:

NO	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Direktorat POA	494.674.299.000	44.857.979.744	9,07
2	Direktorat PPSDK	8.235.790.000	1.324.442.251	16,08
3	Direktorat PPSDP	7.850.000.000	204.407.833	2,60
4	Direktorat PP	6.868.400.000	443.310.757	6,45
5	Sekretariat DITJEN. PSDKP	121.584.885.000	17.514.788.561	14,41
6	UPT PSDKP	505.473.857.000	74.279.219.583	14,69
7	Dekonsentrasi	6.576.499.000	-	-
	TOTAL	1.151.263.730.000	138.624.148.729	12,04

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan indikator kinerja yang pada tahun 2022 memiliki 18 indikator kinerja menjadi 22 indikator kinerja. Perubahan ini tentunya sudah melalui pembahasan secara mendalam dilingkungan Ditjen PSDKP dengan memperhatikan kebijakan Kementerian kelautan dan perikanan serta manajemen kinerja yang ditetapkan.

Pada triwulan I Tahun 2023, Ditjen PSDKP telah menetapkan target untuk 8 indikator kinerja, dan mampu dicapai sesuai target dengan nilai kinerja organisasi sebesar **116,37%**. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi sebesar **12,04%**.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja eselon I lingkup Ditjen PSDKP terkait hasil pemeriksaan dan verifikasi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;
3. Melakukan penelaahan dan penajaman formulasi penghitungan kinerja tahun 2023, khususnya kriteria yang ditetapkan agar capaian kinerja yang dihitung semakin handal;



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	73
		2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87
SP1.2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	3. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100
		4. Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	89,4
		5. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		6. Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80
SP1.3	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	7. Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
SP1.4	Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	8. Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan (indeks)	86
PROGRAM 2. DUKUNGAN MANAJEMEN			
SP2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	9. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	33,5
		10. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70
		11. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	12
		12. Level Maturitas SPIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	78
		14. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,5
		15. Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2022 (%)	≤0,5
		17. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		18. Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	75

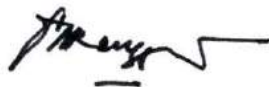
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		19. Unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	77,5
		22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	89
		23. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	823.000.000.000
SP1.1	<i>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
SP1.2	<i>Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan efektif dan efisien</i>	
2.	Program Dukungan Manajemen	328.263.731.000
SP2.1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</i>	
TOTAL ANGGARAN		1.151.263.731.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**